

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENERIMA
MANFAAT TERHADAP PROGRAM RUMAH LAYAK
HUNI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh :
M.RANDI NOVAL
NIM. 160802072**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Randi Noval
Nim : 160802072
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh
Tempat Tanggal Lahir: Muka Blang, 01-11- 1998
Alamat : Punge jurong meuraxa

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.


Bila diikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 juli 2023

Yang menyatakan




M. Randi Noval
Nim. 160802072

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

M. RANDI NOVAL


160802072

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP.196110051982031007



Fakhruddin, S.E., M.M.
NIP.196406162014111002

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENERIMA MANFAAF TERHADAP
PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

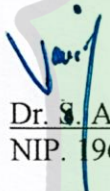
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juli 2023 M

2 Muharram 1445 H

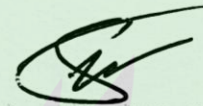
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris



Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007



Fakhruddin, S.E., M.M.
NIP. 196406162014111002

Penguji I

Penguji II



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 199007212020121016



Winny Dian Safitri.
NIP. 199005242022032001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muli Muli, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, maka Pemerintah Aceh perlu menyusun upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Adapun salah satu upaya Pemerintah Aceh adalah dengan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Observasi awal peneliti yang dilakukan di salah satu gampong yang ada di Kota Banda Aceh, pembangunan RLH dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan Ketidakmerataan kualitas rumah yang diberikan menjadi permasalahan. Terdapat masyarakat yang memperoleh pembangunan RLH dilengkapi keramik. Sedangkan juga terdapat masyarakat penerima manfaat yang memperoleh rumah yang tidak dilengkapi dengan keramik. Pembangunan RLH di Kota Banda Aceh terdapat 17 penerima pada tahun 2021 dan 23 penerima di tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Manfaat Terhadap Program Rumah Layak Huni Di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian dari 13 pernyataan dari indikator Rumah Sehat Layak Huni mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,96 dan nilai bobot A dengan katagori “Sangat Baik”.

Kata Kunci : *Indeks Kepuasan Masyarakat, Rumah Layak Huni*



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Nikmat dan hidayah-nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Manfaat Terhadap Program Rumah Layak Huni Di Kota Banda Aceh”. Selanjutnya sholawat beriring salam saya sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam berilmu pengetahuan..

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu dengan penuh hormat saya ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
3. Muazzinah, B.Sc.,MPA selaku ketua program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Dr. S. Amirulkamar,M.M.,M.Si., selaku pembimbing I dan Fakhruddin. S.E., MM, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tak pernah bosan dalam memberikan arahan dan motivasi serta membimbing penulis

dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
6. Terima Kasih kepada teman-teman Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 dan juga kepada para responden yang telah membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Yang istimewa untuk keluarga tercinta terutama Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan juga menyadari bahwa skripsi jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Peneliti

M. Randi Noval
Nim. 160802072

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	8
1.6. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Pengertian Kepuasan.....	12
2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	13
2.4. Pengertian Program.....	15
2.5. Pengertian Rumah Layak Huni.....	16
2.6. Syarat Penerima Manfaat Rumah Layak Huni.....	16
2.7. Persyaratan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni.....	17
2.8. Kriteria Rumah Layak Huni.....	19
2.9. Persyaratan Teknisi RLH.....	22
2.10. Kerangka Berfikir	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian	26
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	28
3.3. Lokasi Penelitian.....	29
3.4. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel.....	29
3.5. Sumber Data.....	30
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.7. Teknik Pengolahan Data	32
3.8. Uji Instrumen	34
3.9. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	37
4.1.1. Sejarah Rumah layak huni kota banda aceh	37
4.1.2. Visi dan Misi.....	38
4.1.3. Tugas pokok dan fungsi.....	40
4.1.4. Asas pembangunan rumah layak huni	41
4.1.5. Karakteristikresponden	41
4.1.6. Karakteristikresponden jenis kelamin.....	41
4.1.7. Karakteristikresponden pekerjaan.....	42
4.1.8. Karakteristikresponden usia.....	44
4.1.9. Karakteristikresponden pendapatan perbulan	45
4.1.10. Uji coba instrumen	47
4.1.11. Uji Validitas	48
4.1.12. Uji Reliabilitas	49
4.1.13. Hasil analisis data.....	50
4.2. Pembahasan Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5. 1. Kesimpulan	64
5. 2. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 66
LAMPIRAN.....

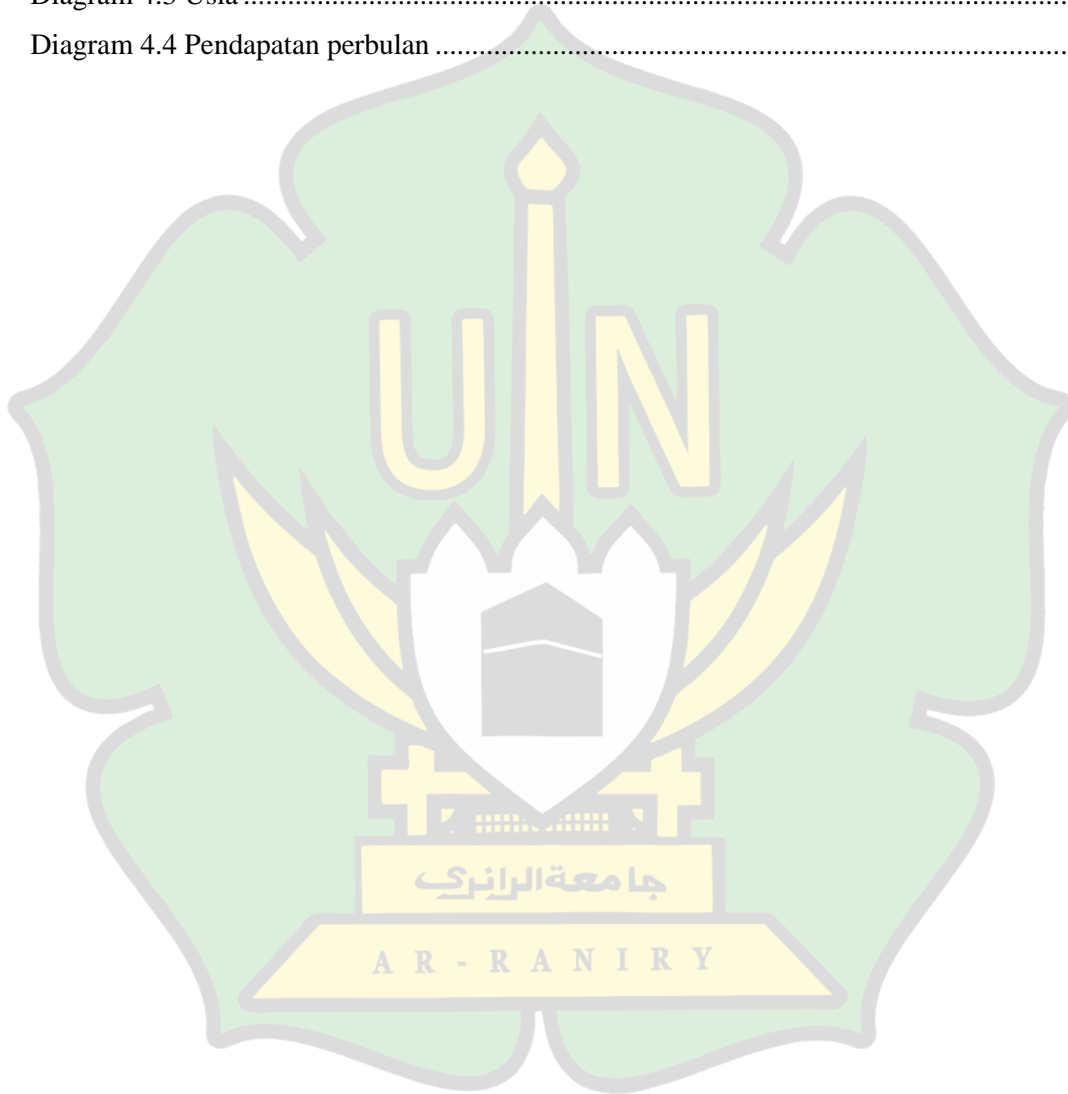


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel	28
Tabel 3.2 Skoring.....	33
Tabel 3.3 Instrumen Penelitian	33
Tabel 3.4 Interpretasi Reliabilitas Instrumen.....	35
Tabel 3.5 Nilai Persepsi dan Interval IKM	36
Tabel 4.1 Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4.2 Pekerjaan.....	43
Tabel 4.3 Usia	44
Tabel 4.4 Pendapatan Perbulan.....	46
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	48
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	50
Tabel 4.7 Nilai Skor Per Unsur Kepuasan	50
Tabel 4.8 Nilai Rata-Rata Perunsur Kepuasan.....	51
Tabel 4.9 Nilai Rata-Rata Tertimbang Kepuasan	53
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Analisis Kepuasan.....	55
Tabel 4.11 Tabulasi Hasil IKM.....	62
Tabel 4.12 Kesimpulan Hasil Ikm	63

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Jenis Kelamin.....	42
Diagram 4.2 Pekerjaan.....	44
Diagram 4.3 Usia.....	45
Diagram 4.4 Pendapatan perbulan.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

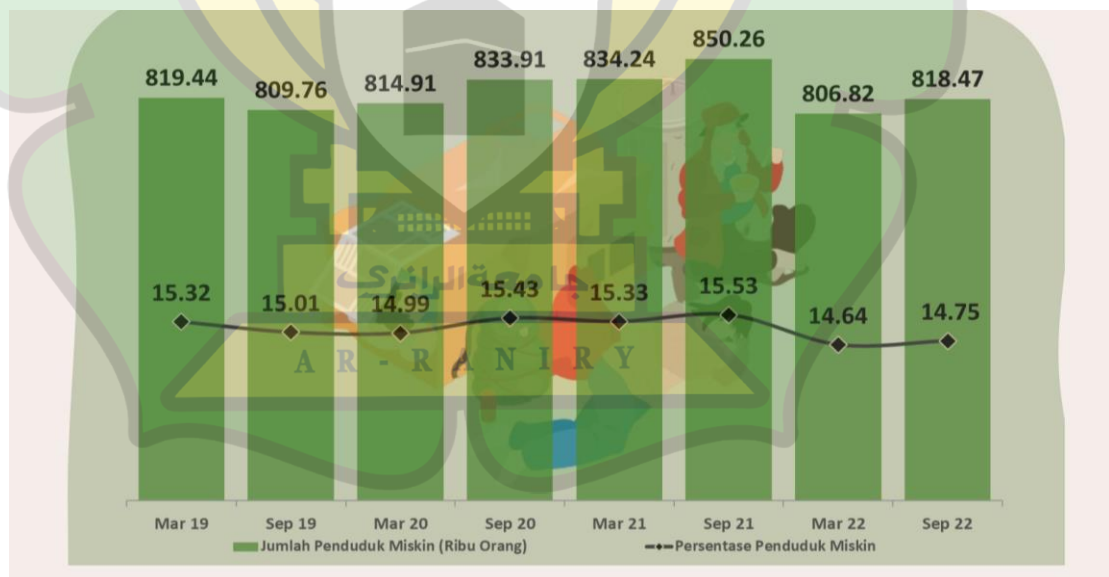
Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks di Indonesia dan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan saja namun juga sebagian besar terjadi di perkotaan. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah suatu paket barang atau jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket tersebut terdiri dari sandang, pangan dan papan.¹

Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Pada Maret 2019, persentase penduduk miskin Aceh sebesar 15,32 persen. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 15,01 persen pada September 2019. Pada awal tahun 2020, wabah covid-19 melanda Indonesia dan menyebabkan terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak dari wabah tersebut mulai terasa di Aceh pada April 2020. Sehingga pada Maret 2020, persentase penduduk miskin di Aceh masih mengalami penurunan menjadi 14,99 persen sedangkan pada September 2020 mulai terasa dampak wabah covid-19, yang terlihat dari persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 15,43 persen.²

¹Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: RenikaCipta, 2003, hal. 344.

² Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, No. 05/01/11/Th. XXVI, diakses aceh.bps.go.id.

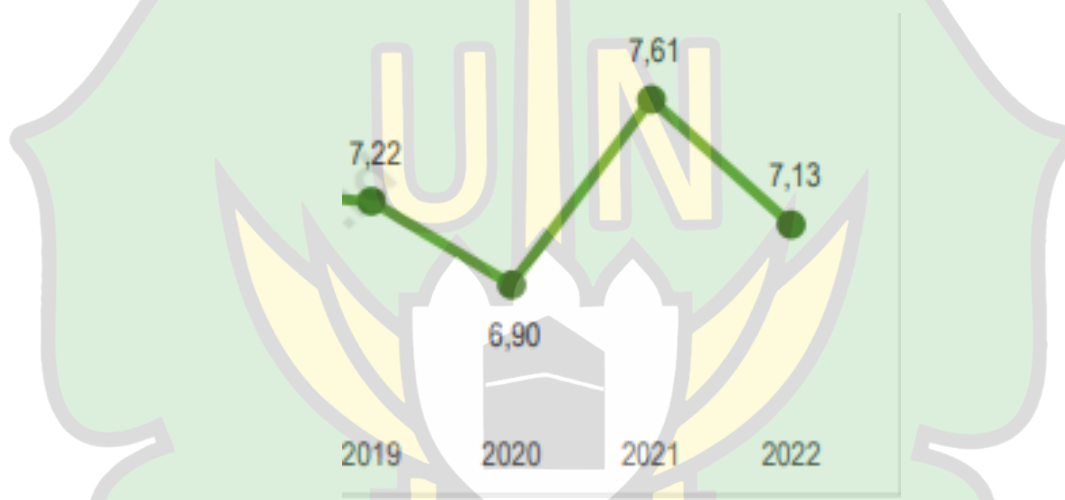
Pada Maret 2021, persentase penduduk miskin 15,33 persen kemudian pada September 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 15,53 persen. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 14,64 persen. Kondisi September 2022, persentase penduduk miskin kembali mengalami kenaikan menjadi 14,75 persen. Kenaikan angka kemiskinan pada September 2022 terjadi secara nasional dan hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Pada Bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 818,47 ribu orang (14,75 persen), mengalami kenaikan sebesar 11,7 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2022 yang jumlahnya 806,82 ribu orang (14,64 persen). Kenaikan angka kemiskinan pada September 2022 terjadi secara nasional dan hampir di seluruh provinsi di Indonesia.³



Gambar 1.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Aceh 2019-2022
Sumber: BPS Aceh

³ *Ibid*,

Selanjutnya di Kota Banda Aceh Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 19,42 ribu (7,22 persen). Terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 yaitu menjadi 18,97 ribu (6,90 persen). Kemudian di tahun 2021 jumlah penduduk miskin di banda aceh mengalami kenaikan menjadi 20,95 ribu (7,61 persen). Kemudian kondisi di tahun 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 19,90 ribu orang (7,13 persen).⁴



Gambar 1.2 persentase penduduk miskin Kota Banda Aceh

Sumber: BPS Aceh

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di atas, maka pemerintah Aceh perlu menyusun upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Adapun salah satu upaya Pemerintah Aceh adalah dengan program pembangunan Rumah Layak Huni (RLH). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan

⁴ Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh *diakses* bandaacehkota.bps.go.id

mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan Permenpu RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. Melalui program Rumah Layak Huni Pemerintah Aceh berupaya untuk membantu memenuhi hak dasar rakyat dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam memenuhi perumahan layak huni makin besar seiring dengan meningkatnya jumlah pembangunan perumahan yang merupakan dampak dari meningkatnya jumlah penduduk. Dalam lingkungan perumahan sendiri harus terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelayakan perumahan yang dihuni sehingga dapat memberikan rasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera bagi penghuninya. Peran tersebut telah sesuai dengan peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, dan katalisator. Dalam mewujudkan perumahan yang layak huni, hal yang menjadi faktor pendukungnya antara lain adanya bantuan dari pemerintah berupa pembangunan secara fisik maupun pemberian penghargaan serta

dukungan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten.⁵

Selain itu Rumah layak huni merupakan salah satu dari 15 program unggulan Pemerintah Aceh, yaitu Aceh Seuniya yang terus dibangun di seluruh kabupaten dan kota di Aceh dengan tujuan memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat kurang mampu. Pada tahun 2021 Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Banda Aceh melakukan pembangunan 17 rumah layak huni yang ada di Kota Banda Aceh dan 23 rumah layak huni di tahun 2022.⁶

Penyaluran bantuan menjadi suatu bentuk yang terpenting dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Kesalahan dalam penyaluran bantuan menjadi suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang merugikan masyarakat banyak. Karena penyaluran bantuan masyarakat yang tepat sasaran sedikit tidaknya sudah menyeimbangkan kehidupan masyarakat yang berekonomi lemah, dengan kehidupan yang lebih dari sebelumnya masyarakat sendiri dapat berinteraksi dengan nyaman serta bisa melestarikan budaya-budaya yang telah ada.

Pembangunan rumah layak huni di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Aceh. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan

⁵ Perkim.id diakses <https://perkim.id/profil-pkp/> pada tanggal 14 februari 2023

⁶ Data Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni PERKIM Kota Banda Aceh

perencanaan, dibangun dengan baik, dimanfaatkan, dan dikendalikan dengan baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terpadu dan terkoordinasi dengan baik.

Untuk merealisasikan peraturan Gubernur tersebut, Walikota Banda Aceh juga mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Qanun ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Pelaksanaan pengisian survei indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan MENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.⁷

Menurut observasi awal yang dilakukan di salah satu gampong yang ada di Kota Banda Aceh, pembangunan RLH dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan dan kesenjangan di kalangan masyarakat. Ketidakmerataan kualitas rumah yang diberikan menjadi permasalahan. Terdapat masyarakat yang memperoleh pembangunan RLH dilengkapi keramik. Sedangkan juga terdapat masyarakat penerima manfaat yang memperoleh rumah yang tidak dilengkapi dengan keramik.

⁷ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Sedangkan jika melihat pada Pasal 2 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh disebutkan bahwa salah satu pembangunan RLH harus berasaskan keadilan.

Melihat peristiwa tersebut maka peneliti tertarik ingin mengkaji sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap program RLH tersebut, dengan studi kasusnya di Kota Banda Aceh. Adapun judul penelitian ini adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Manfaat Terhadap Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan untuk penelitian yaitu adanya kesenjangan di lingkungan masyarakat, karena beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah layak huni tidak memperoleh bangunan secara lengkap seperti tidak dilengkapi dengan keramik.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa puaskah masyarakat terhadap bantuan program rumah layak huni yang diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi terkait indeks kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap program rumah layak huni di Kota Banda Aceh.

2. Manfaat akademis

Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca terkait indeks kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap program rumah layak huni di Kota Banda Aceh dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

1.6. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan para pembaca untuk memahami istilah dalam penelitian ini, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

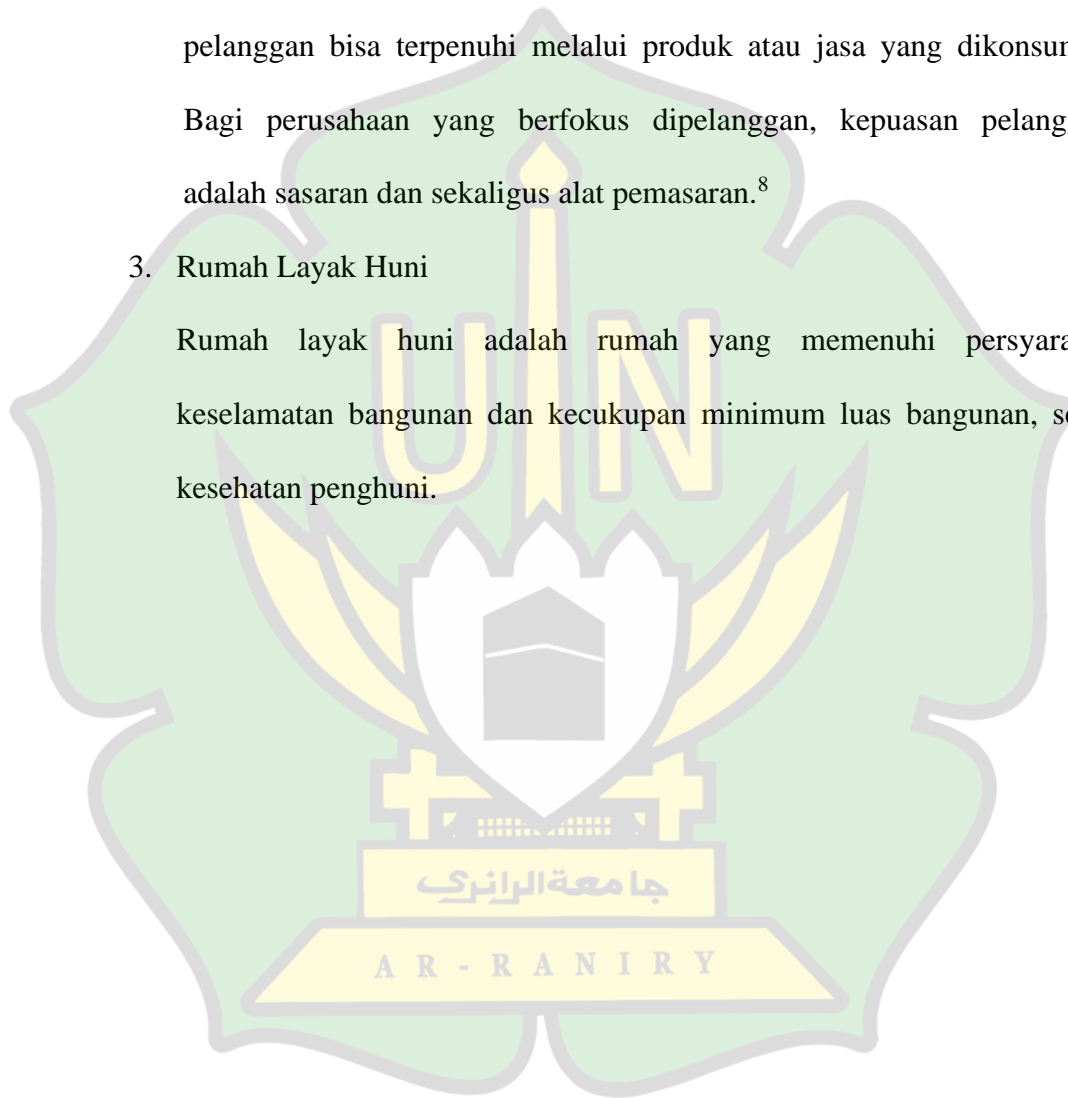
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

2. Kepuasan

Pada penelitian Yoga Budi Bhakti dan Eva Yuni Rahmawati menjelaskan bahwa kepuasan pelanggan mampu didefinisikan secara sederhana, yaitu menjadi suatu keadaan saat kebutuhan dan harapan pelanggan bisa terpenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsi. Bagi perusahaan yang berfokus dipelanggan, kepuasan pelanggan adalah sasaran dan sekaligus alat pemasaran.⁸

3. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.



⁸ Yoga Budi Bhakti dan Eva Yuni Rahmawati, “Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Program Studi Pendidikan Matematika”, Jurnal Formatif 7(3): 272-285, 2017, ISSN: 2088-351X, hal. 275.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti menyajikan informasi pendukung dari hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Zania pada tahun 2017 dengan judul **Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH) Di Kota Tegal**. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini bahwasanya Analisa kuantitatif efektivitas program Bantuan Sosial RTLH di Kota Tegal rata-rata telah efektif dengan nilai 2,67. Indikator sosialisasi dan pemahaman program sebesar 2,36. Indikator ketepatan sasaran sebanyak 3,37. Indikator tujuan program sebanyak 2,56. Indikator perubahan nyata sebanyak 2,70 dan indikator pemantauan program sebanyak 2,37. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat hambatan antara lain dana bantuan yang dirasa masih belum cukup untuk memperbaiki rumah warga, adanya syarat yang tidak terpenuhi seperti warga yang menolak bantuan sehingga pelaksanaan pun terhambat, kurang meratanya pembagian anggaran di tiap-tiap Kelurahan maupun tiap rumah, waktu pelaksanaan yang terlalu singkat sehingga hasil pengerjaan kurang maksimal, dan sosialisasi program yang kurang sehingga banyak warga yang masih belum memahami tentang program secara rinci. Selain itu program juga telah membantu mengurangi jumlah permukiman kumuh yang ada di Kota Tegal dengan cukup signifikan dimana dalam 2 tahun jumlah rumah tidak layak huni

yang telah ditangani sekitar 41% dari jumlah RTLH yang terdaftar dalam PBDT.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fazli Efendi pada tahun 2019 dengan judul **Analisis kepuasan Masyarakat Terhadap Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti**. Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini bahwasanya masyarakat di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti sudah merasa puas atas rumah sehat layak huni (rslh) yang telah diterima hal ini terlihat pada hasil rekapitulasi kuesioner yang telah dijawab oleh responden yang mencapai angka rata-rata 79% (setuju). Berdasarkan hasil dari analisis uji validitas terdapat hasil dari kuesioner yang telah disebarkan dinyatakan valid dengan nilai r hitung > dari nilai r tabel yaitu 0,349. Berdasarkan hasil dari analisis uji reliabilitas bahwa semua item pertanyaan sebanyak delapan pertanyaan dinyatakan reliabel atau konstan karena terlihat pada nilai cronbach's alpha yaitu 0,697 > dari nilai r tabel 0,60.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ajinu Stefano Da Costa pada tahun 2022 dengan judul **Implementasi Program Rumah Layak Huni Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur**. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian

⁹ Rahmawati Zania, "*Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH) Di Kota Tegal*" (Tegal: Universitas Diponegoro, 2017), hal. 17.

¹⁰ Fazli Efendi, "*Analisis kepuasan Masyarakat Terhadap Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*" (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2019) hal. 57.

ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa implementasi program rumah layak huni dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Timor Tengah Utara belum Optimal atau masih belum maksimal pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan atau dibuktikan dengan tidak tercapainya Target jumlah Pembangunan rumah layak huni di kabupaten Timor Tengah Utara.¹¹

2.2. Pengertian Kepuasan

Kepuasan dapat diartikan sebagai rasa senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mendapatkan pelayanan suatu jasa. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Menurut Muin dalam penelitian Yoga Budi Bhakti dan Eva Yuni Rahmawati mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan dapat didefinisikan secara sederhana, yaitu sebagai suatu keadaan saat kebutuhan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsi. Bagi perusahaan yang berfokus pada pelanggan, kepuasan pelanggan adalah sasaran dan sekaligus alat pemasaran.¹²

¹¹ Ajinu Stefano Da Costa, Implementasi Program Rumah Layak Huni Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Asdaf Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

¹² Yoga Budi Bhakti dan Eva Yuni Rahmawati, "Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Program Studi Pendidikan Matematika", Jurnal Formatif 7(3): 272-285, 2017, ISSN: 2088-351X, hal. 275.

2.3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan publik selanjutnya. Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Adapun menurut Peraturan MenPan RB Nomor 14 Tahun 2017 survei kepuasan masyarakat memiliki 9 unsur:¹³

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

¹³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur

adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan prasarana Sarana

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.4. Pengertian Program

Program merupakan suatu rangkaian instruksi-instruksi dalam bahasa computer yang disusun secara logis dan sistematis. Program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberi manfaat kepada masyarakat maka boleh dikatakan program tersebut gagal dilaksanakan.¹⁴

Dari penjelasan diatas program dapat diartikan sebagai bentuk operasional dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tersusun secara jelas

¹⁴ Waluyo, 2007. *Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandar Maju: Bandung.

guna melaksanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan didalam kebijakan agar dapat tercapai secara nyata.

2.5. Rumah Layak Huni

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Perumahan yang layak untuk tempat tinggal harus memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang dilengkapi ketersediaan prasarana dan sarana pendukung lainnya seperti penyediaan air bersih, sanitasi, tempat pembuangan sampah, transportasi dan tersedianya pelayanan sosial.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun persyaratan dari penerima manfaat program rumah layak huni adalah fakir, miskin, penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kemampuan dalam bekerja, serta anak yatim-piatu atau yatim piatu yang berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal.

2.6. Syarat Penerima Manfaat Rumah Layak Huni

Adapun syarat untuk dapat menerima manfaat rumah layak huni dari pemerintah, terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 pasal 7, yaitu:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Penyandang disabilitas; dan / atau
- d. Anak yatim, piatu atau yatim piatu.

Penerima manfaat sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, telah berumur diatas 40 tahun dan tidak mempunyai pekerjaan tetap serta memiliki tanggungan anak atau keluarga besar. Penerima manfaat sebagaimana dimaksud huruf c, tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja. Kemudian Penerima manfaat sebagaimana dimaksud huruf d, berumur dibawah 18 tahun dan tidak memiliki tempat tinggal.

Kemudian dalam pasal 9 menyatakan bahwa penerima manfaat dari pembangunan Rumah Sehat Layak Huni tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli terhadap rumah yang diterima oleh penerima manfaat. Apabila diketahui telah terjadi transaksi jual beli, akan diberikan sanksi dan dicabut kepemilikannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁵

2.7. Persyaratan Bangunan Rumah Tidak Layak Huni

a. Persyaratan Administrasi RTLH meliputi:

1) Status hak atas tanah

Pembangunan RTLH diselenggarakan di atas tanah yang sudah jelas status haknya, dimana calon penerima RTLH harus memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah,

2) Dokumen pendaftaran meliputi :

1) Surat permohonan dari calon penerima RTLH.

2) Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan:

¹⁵ Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh Diakses pada 08 Februari 2023.

- Belum pernah menerima bantuan RTLH berupa dana yang bersumber dari APBN/APBA/APBK, dari penerima zakat dan infaq masyarakat, maupun swasta;
 - Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi;
 - Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan;
 - Kualitasnya atau belum memiliki rumah; dan
 - Akan menghuni sendiri bangunan RTLH yang diberikan.
- 3) Data identitas calon penerima RTLH (fotocopy KTP dan KK).
 - 4) Fotocopy sertifikat hak atas tanah/surat bukti menguasai tanah dari kepala desa.
 - 5) Foto rumah calon penerima RTLH.
 - 6) Surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan lain yang mendukung dan disahkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan.
- 3) Dokumen pembangunan meliputi :
 - a. Titik koordinat lokasi rumah calon penerima (GPS).
 - b. Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan.
 - c. Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik, pekerjaan pengawasan, beserta segala perubahan addendumnya.
 - d. Laporan harian selama masa pelaksanaan konstruksi fisik.
 - e. Foto dokumentasi pekerjaan.

2.8. Kriteria Rumah Layak Huni

Kriteria rumah layak huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, yakni :¹⁶

- a. Keselamatan bangunan meliputi:
 - 1) Struktur bawah/pondasi;
 - 2) Struktur tengah/kolom dan;
 - 3) Balok dan struktur atas/atap.
- b. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi.
- c. Kecukupan luas minimum $7,2 \text{ m}^2 - 12 \text{ m}^2$ /orang.

Kriteria rumah layak huni sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni. Contoh persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada kriteria rumah layak huni adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. Memenuhi Persyaratan Keselamatan Bangunan
 1. Ketentuan Struktur Bawah (Pondasi)
 - 1) Pondasi harus ditempatkan pada tanah yang mantap, yaitu ditempatkan pada tanah keras, dasar pondasi diletakkan lebih dalam dari 45 cm dibawah permukaan tanah.

¹⁶ Permen Pupr RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Diakses* pada 08 Februari 2023.

¹⁷ Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. *Diakses* pada 10 Februari 2023.

- 2) Seluruh badan pondasi harus tertanam dalam tanah.
- 3) Pondasi harus dihubungkan dengan balok pondasi atau sloof, baik pada pondasi setempat maupun pondasi menerus .
- 4) Balok pondasi harus diangkerkan pada pondasinya, dengan jarak angker setiap 1,50 meter dengan baja tulangan diameter 12 mm.
- 5) Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing, untuk mencegah longsor, tebing diberi dinding penahan yang terbuat dari pasangan atau turap bambu maupun kayu.

2. Struktur Tengah Ketentuan

- 1) Bangunan harus menggunakan kolom sebagai rangka pemikul, dapat terbuat dari kayu, beton bertulang, atau baja.
- 2) Kolom harus diangker pada balok pondasi atau ikatannya diteruskan pada pondasinya.
- 3) Pada bagian akhir atau setiap kolom harus diikat dan disatukan dengan balok keliling/ring balok dari kayu, beton bertulang atau baja.
- 4) Rangka bangunan (kolom, ring balok, dan sloof) harus memiliki hubungan yang kuat dan kokoh.
- 5) Kolom/tiang kayu harus dilengkapi dengan balok pengkaku untuk menahan gaya lateral gempa.
- 6) Pada rumah panggung antara tiang kayu harus diberi ikatan diagonal.

3. Struktur Atas

- 1) Rangka kuda-kuda harus kuat menahan beban atap.
- 2) Rangka kuda-kuda harus diangker pada kedudukannya (pada kolom atau ring balok).
- 3) Pada arah memanjang atap harus diperkuat dengan menambah ikatan angin di antara rangka kuda-kuda.

b. Menjamin Kesehatan

- 1) Kecukupan pencahayaan rumah layak huni minimal 50% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tamu dan minimal 10% dari dinding yang berhadapan dengan ruang terbuka untuk ruang tidur.
- 2) Kecukupan penghawaan rumah layak huni minimal 10 % dari luas lantai.
- 3) Penyediaan sanitasi minimal 1 kamar mandi dan jamban di dalam atau luar bangunan rumah dan dilengkapi bangunan bawah septic tank atau dengan sanitasi komunal.

- #### c. Memenuhi kecukupan luas minimum adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m²/orang sampai dengan 12 m²/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi.

2.9. Persyaratan Teknis Rumah Layak Huni

- 1) Bangunan RTLH harus memenuhi persyaratan tata bangunan dan lingkungan dengan kriteria sebagai berikut:¹⁸
 - a. Seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 - b. Indah namun tidak berlebihan;
 - c. Efisien dalam penggunaan sumber daya baik dalam pemanfaatan maupun dalam pemeliharaan;
 - d. Mempertimbangkan daerah resapan air;
 - e. Memperhitungkan ruang terbuka hijau dimana untuk bangunan gedung yang mempunyai Koefisien Dasar Bangunan (KDB) kurang dari 40% harus mempunyai koefisien dasar hijau minimum sebesar 15%, sementara untuk bangunan RTLH koefisien dasar bangunan disesuaikan dengan kondisi lahan tempat rumah tersebut dibangun;
 - f. Ketentuan besarnya garis sempadan, baik garis sempadan bangunan maupun garis sempadan pagar harus mengikuti ketentuan
 - g. Mempertimbangkan nilai sosial budaya setempat dalam menerapkan perkembangan arsitektur dan rekayasa;
 - h. Mempertimbangkan kaidah pelestarian bangunan baik dari segi sejarah maupun langgam arsitekturnya.

¹⁸ Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Diakses pada 10 Februari 2023.

2) Persyaratan utilitas bangunan

Bangunan RTLH harus memiliki utilitas yang baik meliputi, ketersediaan air minum, pembuangan air kotor, pembuangan limbah, pembuangan sampah, saluran air hujan, penerangan dan pencahayaan, penghawaan dan pengkondisian udara

3) Persyaratan kesehatan dan kenyamanan

Rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Pencahayaan, dimana setiap ruangan harus mendapatkan distribusi cahaya secara merata dan cukup, sehingga dibutuhkan pengaturan kedudukan lubang cahaya yang baik dalam perencanaan.
- b. Penghawaan, dimana kenyamanan pada bangunan rumah sangat dipengaruhi oleh lancarnya sirkulasi udara yang masuk dan keluar. Sehingga memberikan kesegaran terhadap penghuninya dan terciptanya rumah sehat. Untuk itu bangunan RTLH harus dilengkapi dengan ventilasi udara yang cukup untuk mengalirkan udara secara menerus.
- c. Suhu udara dan kelembaban, dimana untuk menciptakan kesehatan dan kenyamanan dibutuhkan pengaturan dengan cara mengatur sebaik-baiknya sistem pencahayaan dan penghawaan

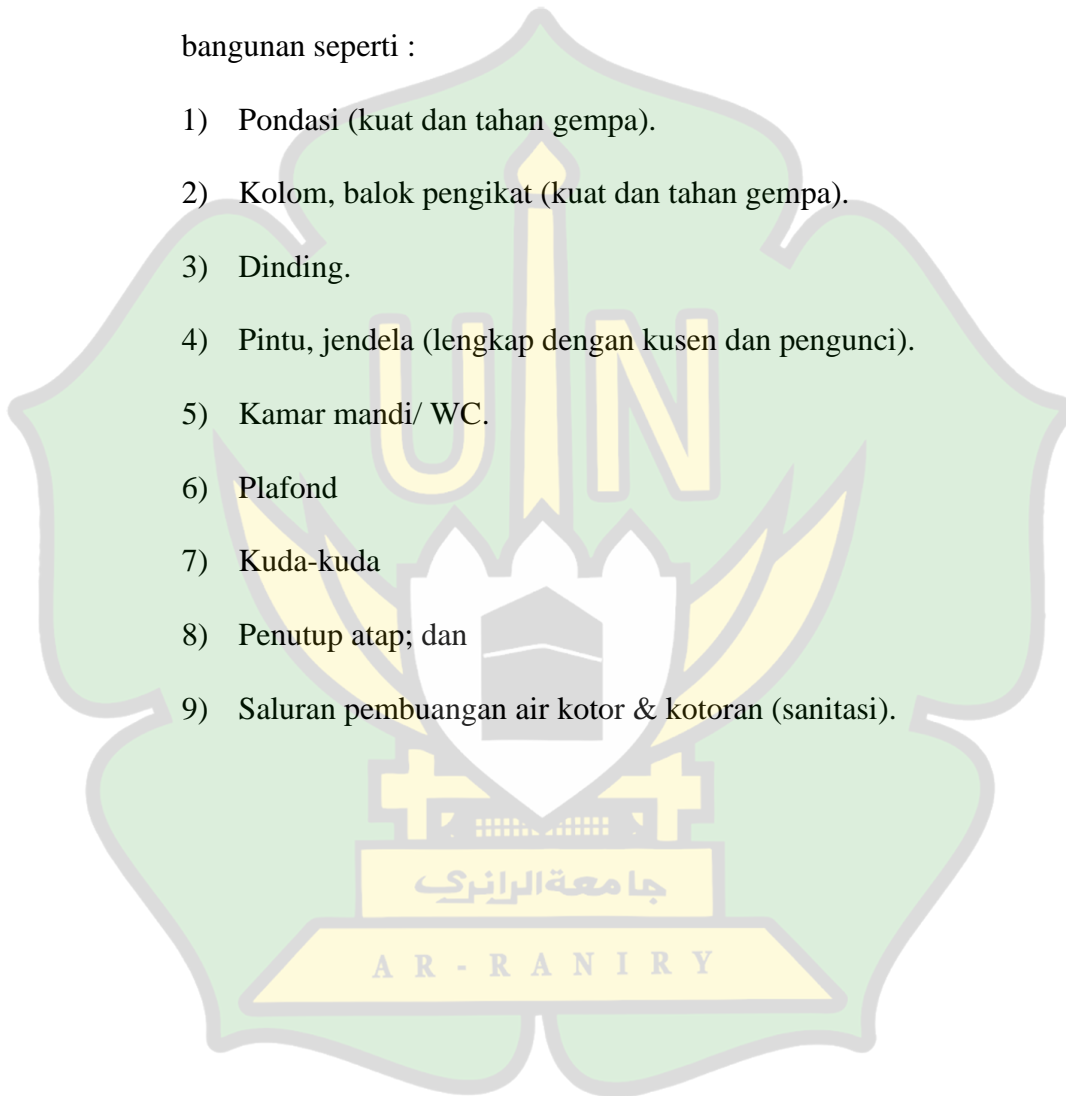
4) Persyaratan struktur bangunan

- a. Bangunan RTLH harus memiliki persyaratan kualitas bangunan yang baik dengan memperhatikan standar mutu dan kualitas bahan yang digunakan,

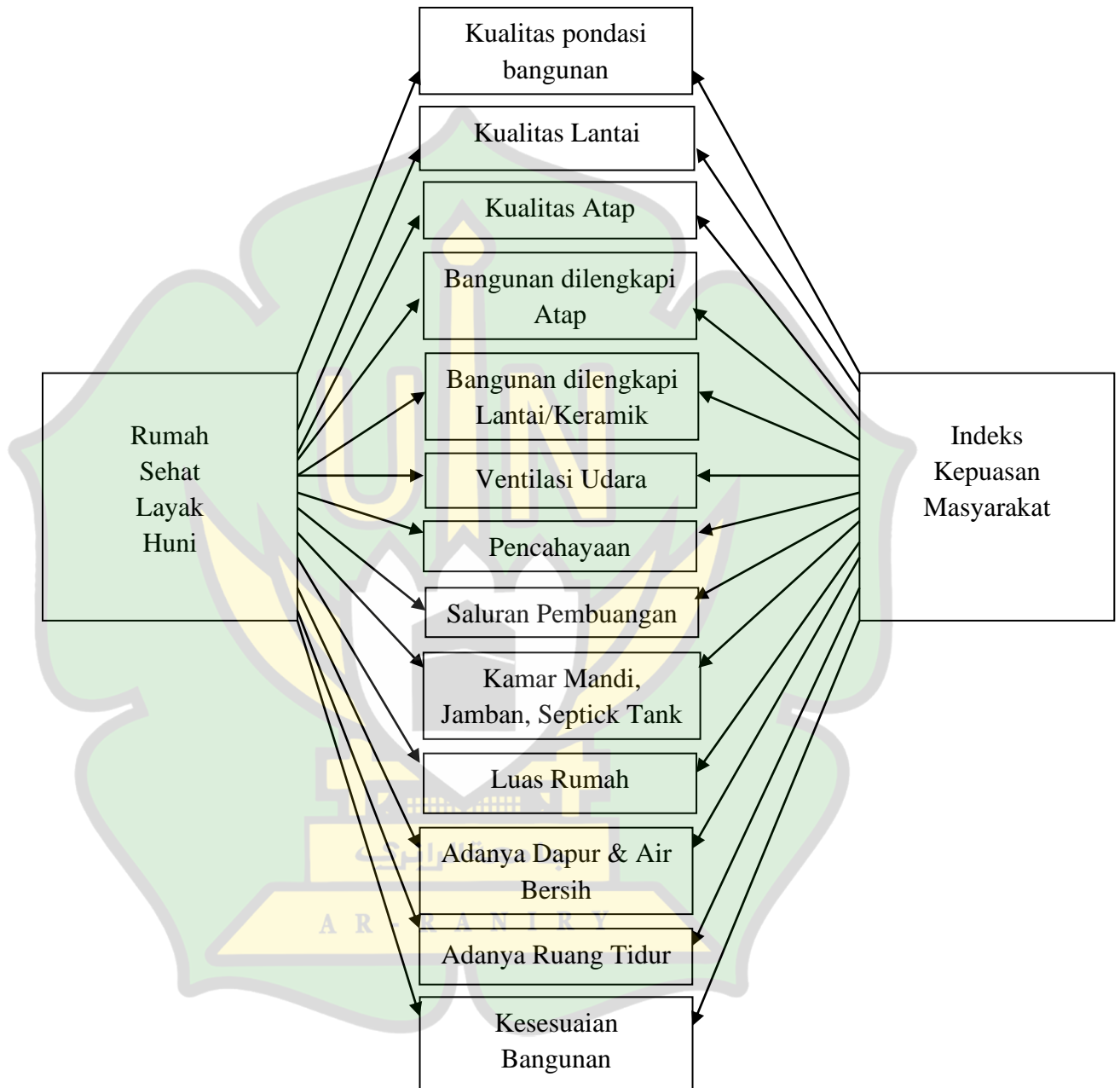
keberadaan dan dimensi struktur yang sesuai dan tersambung dengan baik serta mutu pengerjaan yang baik.

b. Pembangunan RTLH harus memiliki minimal komponen kelengkapan bangunan seperti :

- 1) Pondasi (kuat dan tahan gempa).
- 2) Kolom, balok pengikat (kuat dan tahan gempa).
- 3) Dinding.
- 4) Pintu, jendela (lengkap dengan kusen dan pengunci).
- 5) Kamar mandi/ WC.
- 6) Plafond
- 7) Kuda-kuda
- 8) Penutup atap; dan
- 9) Saluran pembuangan air kotor & kotoran (sanitasi).



2.10. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang meneliti sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.¹⁹ Kuantitatif merupakan data yang memiliki kecenderungan dapat dianalisis dengan cara atau teknik statistik. Data tersebut dapat berupa angka atau skor dan biasanya diperoleh dengan menggunakan alat pengumpul data yang jawabannya berupa rentang skor atau pertanyaan yang diberi bobot.²⁰

Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menafsirkan serta meramalkan hasilnya. Desain penelitian yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif harus terstruktur, formal, baku dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Desain bersifat spesifikasi dan detail karena desain adalah suatu rancangan penelitian yang akan dilaksanakan sebenarnya.²¹

Dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis pelayanan publik. Pada skala *Likert*

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods*, (Bandung,: Alfabeta , 2002), hal. 11

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung, 2018), hal. 7.

²¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (yogyakarta: Teras, 2011), hal.10.

responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.²²

3.1.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian kuantitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.²³ Metode ini digunakan sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, rasional terukur dan sistematis. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.²⁴

Sedangkan menurut Margono penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang banyak menggunakan logika hipotesis verifikasi yang dimulai dengan berpikir deduktif untuk menurunkan hipotesis yang kemudian dilakukan pengujian di lapangan serta kesimpulan atau hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris²⁵

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode dengan menggunakan teknik survei, yaitu dengan metode penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual. Metode survei yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

²² Keputusan Menteri PAN-RB No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011). Hal. 8

²⁴ *Ibid*, hal.7

²⁵ *Ibid*, hal.100

penyebaran kuesioner kepada Masyarakat Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keselamatan bangunan 2. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. 3. Kecukupan luas minimum 7,2 m² – 12 m² /orang.²⁶ 	<i>Likert</i>

Sumber : Peneliti, 2023

²⁶ Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota. Diakses pada 10 Februari 2023.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada penelitian ini berada di Kota Banda Aceh. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut adalah untuk memudahkan penyebaran angket kepada masyarakat penerima manfaat Rumah Layak Huni.

3.4. Populasi Dan Teknik Penarikan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷ Populasi merupakan keseluruhan data yang menjadi perhatian dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.²⁸ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan unsur objek sebagai sumber data dengan karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Adapun jumlah penerima manfaat RLH di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 berjumlah 17 unit dan 2022 berjumlah 23 unit rumah.²⁹

3.4.2. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh Populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu sampling jenuh. Menurut Sugiyono teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

²⁷ Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung. Hal. 80.

²⁸ Asrof Syafi'i, *Metode Penelitian Pendidikan*, (surabaya: eLKAF, 2005), hal.133

²⁹ Data Penerima Bantuan Program Rumah Layak Huni PERKIM Kota Banda Aceh

Maka dari itu, Penulis memilih sampel menggunakan teknik sampling jenuh karena jumlah populasi yang relatif kecil.³⁰ Sehingga sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 40 orang atau kepala keluarga.

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Primer

Adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti yang bersumber dari responden yang berkaitan.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. pada penelitian ini adalah studi literatur seperti buku, jurnal, dan artikel. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

3.6.1. Observasi

Adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung agar mendapatkan data yang lebih akurat.

³⁰ Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta:Bandung. Hal.116.

3.6.2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya.

3.6.3. Angket

Adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penyebaran daftar pertanyaan kepada responden,³¹ yaitu masyarakat penerima rumah sehat layak huni. Teknik pengukuran instrumen penelitian ini menggunakan alat ukur Likert's Summated Rating (LSR) dengan 5 skala pengukuran dari alternatif jawaban pertanyaan Favorable. Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat keselamatan bangunan pada angket penelitian (nomor pernyataan; 1,2,3,4,5), Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat kesehatan bangunan pada angket penelitian (nomor pernyataan; 6,7,8,9), Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat luas bangunan pada angket penelitian (nomor pernyataan; 10,11,12,13,), diberi jawaban: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).

³¹ Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hal. 78.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan penghitungan komputasi program SPSS (Statistical Product and Service Solution) karena program ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu dekriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara pengoperasiannya. Penelitian ini menggunakan pedoman teknik pengolahan data analisis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data menurut Hasan meliputi kegiatan:³²

a) Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.

b) Kooding

Setelah tahap editing selesai, data-data yang berupa jawaban dari responden akan diberi kode untuk mudah dalam menganalisa data, ini

³² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 24.

penting karena proses pengolahan data akan menggunakan bantuan perangkat komputer. Pengkodean yang digunakan disesuaikan dengan pembahasan pada angket.

c) Tabulasi data

Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkannya data ke dalam tabel. Hasil tabulasi data ini dapat menjadi gambaran tentang hasil penelitian yang memudahkan pembaca memahami maknanya, setelah peneliti memberi penjelasan atau keterangan menggunakan kalimat atas data-data yang telah diperoleh.

Tabel 3.2
Skoring

Pilihan Jawaban	Skor
	<i>Favorable</i>
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Kurang Setuju (KS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Masyarakat penerima manfaat program rumah layak huni	40 KK

Sumber : Peneliti 2023

3.8. Uji Instrumen

Uji coba instrumen pada penelitian ini yang dipilih ialah masyarakat yang mendapatkan manfaat program rumah layak huni. Tujuan dari uji coba instrumen ini yaitu untuk mengukur valid atau tidak angket yang akan digunakan dalam pengumpulan data.

3.8.1. Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sebuah instrumen. Sebuah tes dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian validitas data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item yang menjadi penentuan layak tidaknya item pertanyaan yang digunakan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid), dan sebaliknya.

3.8.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya. Suatu uji dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika uji tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah ketetapan hasil uji. Agar angket yang digunakan benar-benar dipercaya sebagai alat pengumpulan data maka perlu dilakukan uji reliabilitas. Dasar pengambilan keputusan jika nilai

alpha > r tabel maka angket dinyatakan reliabel. Jika nilai alpha > 0,60 artinya reliabilitas mencukupi, sementara jika alpha > 0,80 memiliki reliabilitas yang tinggi, sedangkan jika alpha 0,40– 0,60 maka reliabilitas agak rendah, jika nilai alpha < 0,40 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah maka instrumen tidak reliabel. Uji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS. Dan interpretasi nilai seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Interpretasi Reliabilitas Instrumen

Besarnya nilai r	Interpretasi
0,80 – 1	Tinggi
0,60 - 0,80	Cukup
0,40 – 0,60	Agak Rendah
0,20 – 0,40	Rendah
0,00 – 0,20	Sangat Rendah

3.9. Teknik Analisis Data

Teknik analisis perhitungan IKM dilakukan dengan prinsip perhitungan indeks yang ditetapkan terlebih dahulu mencari nilai rata-rata tertimbang dengan rumus:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{13} = 0.07$$

Keterangan : X = Jumlah unsur yang disurvei

N = Bobot nilai per unsur

Setelah memperoleh bobot nilai rata-rata tertimbang pada setiap indikator, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran indeks. Metode yang digunakan pada pengukuran indeks adalah nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing indikator. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total nilai perunsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Tabel 3.5
Nilai Persepsi dan Interval IKM

NILAI BOBOT	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM		KATEGORI
				KEPUASAN
1	E	1.00 - 1.79	2.00 – 35.99	STS
2	D	1.80 – 2.59	36.00 – 51.99	TS
3	C	2.60 – 3.39	52.00 – 67.99	KS
4	B	3.40 – 4.19	68.00 – 83.99	S
5	A	4.20 – 5.00	84.00 – 100.00	SS

Guna mendapatkan nilai tertimbang per unsur dikalikan dengan nilai bobot rata-rata tertimbang, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang per unsur. Sedangkan nilai Indeks gabungan untuk setiap unit kepuasan dikalikan dengan penimbang yang sama dan hasil tersebut merupakan nilai indeks kepuasan terhadap penerima program rumah sehat layak huni.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Rumah Layak Huni Kota Banda Aceh

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan dalam penciptaan rumah layak huni adalah kebutuhan minimal masa (penampilan), dan ruang (luar-dalam) (kebutuhan luas); kebutuhan kesehatan dan kenyamanan; dan kebutuhan minimal keamanan dan keselamatan. Adapun pengadaan Rumah Sehat Layak huni adalah kegiatan pengadaan bangunan yang diperuntukan bagi masyarakat kurang mampu.³³

Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh adalah pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan, konsisten dan terpadu baik intra maupun antar Satuan Kerja Perangkat Aceh atau instansi lainnya serta memperhatikan eksistensi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rumah layak huni merupakan salah satu dari 15 program unggulan Pemerintah Aceh, yaitu Aceh Seuniya yang terus dibangun di seluruh kabupaten dan kota di Aceh dengan tujuan memberikan tempat tinggal yang layak bagi

³³ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016

masyarakat kurang mampu. Pemerintah Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh melakukan pembangunan 4.042 unit Rumah Layak Huni untuk penerima manfaat, mulai dari fakir miskin, kaum duafa, penyandang disabilitas pada tahun 2020.

Kemudian pada tahun 2021 Pemerintah Aceh juga berupaya membangun 4.300 unit rumah di seluruh Aceh. Selanjutnya untuk pembangunan rumah layak huni di Kota Banda Aceh terdapat 17 penerima pada tahun 2020 dan 23 penerima di tahun 2021. Pembangunan rumah layak huni di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 145 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Di Aceh. Untuk merealisasikan peraturan Gubernur tersebut, Walikota Banda Aceh juga mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Qanun ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

4.1.2. Visi dan Misi Dinas Perkim Kota Banda Aceh

1. Visi

Visi pembangunan Kota Banda Aceh yang ingin dicapai “Terwujudnya Kota Banda Aceh Model Kota Madani yang Gemilang” Melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan

untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.³⁴

2. Misi

1. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kota Banda Aceh untuk mewujudkan visi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta, maka Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman Kota Banda Aceh lebih fokus pada Misi “memperluas inovasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman, dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial kemasyarakatan;
2. Menurunnya luas permukiman kumuh;
3. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP) di tingkat Kabupaten/Kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
4. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPJMD);
5. Meningkatkan penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan

³⁴ <https://perkim.bandaacehkota.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2023.

penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan

6. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkim Kota Banda Aceh

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
3. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
4. Melaksanakan tugas sesuai rencana kerja pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku pada Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
6. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.
7. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang perumahan.
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang permukiman.

4.1.4. Asas Pembangunan Bangunan Rumah Layak Huni

1. Kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian atau keselarasan bangunan dengan lingkungannya.
2. Hemat, efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan dan ketentuan teknis yang disyaratkan.
3. Semaksimal mungkin melibatkan masyarakat setempat memelihara budaya kearifan lokal.

4.1.5. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu penghuni perumahan rumah sehat layak huni (RSLH) di Kota Banda Aceh. Jumlah orang yang terpilih sebagai responden yaitu sebanyak 40 orang. Dengan identitas sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin
2. Pekerjaan
3. Usia
4. Pendapatan per Bulan.

4.1.6. Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

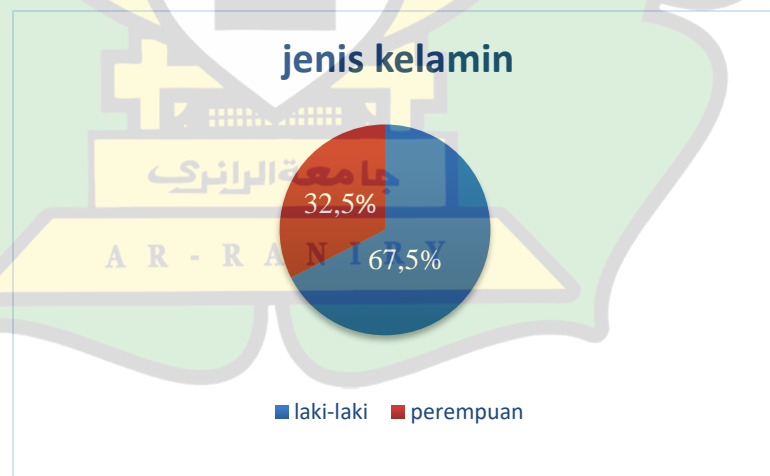
Tabel 4.1
jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
laki-laki	27	67.5	67.5	67.5
Valid perempuan	13	32.5	32.5	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber: Data Olahan (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya responden yang didapat peneliti di rumah sehat layak huni berdasarkan jenis kelamin yaitu dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang dengan persentase 67,5% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang dengan persentase 32,5% dari jumlah keseluruhan responden sebanyak 40 orang.

Diagram 4.1
Jenis Kelamin



4.1.7. Karakteristik Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

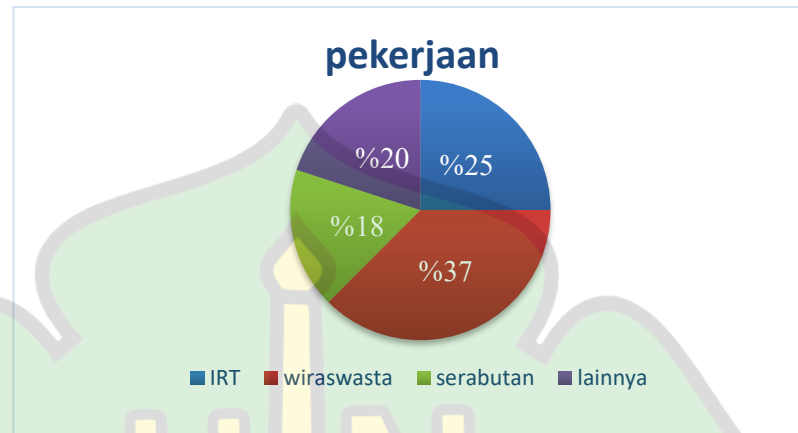
Tabel 4.2
Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
IRT	10	25.0	25.0	25.0
wiraswasta	15	37.5	37.5	62.5
Valid Serabutan	7	17.5	17.5	80.0
Lainnya	8	20.0	20.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber: Data Olahan (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya dengan jumlah responden 40 orang yang didapat peneliti di rumah sehat layak huni berdasarkan pekerjaan yaitu untuk pekerjaan Ibu Rumah Tangga sebanyak 10 orang dengan persentase 25%. Selanjutnya untuk pekerjaan wiraswasta sebanyak 15 orang dengan persentase 37,5%, pekerjaan serabutan sebanyak 7 orang dengan persentase 17,5% dan pekerjaan lainnya selain daripada pekerjaan Ibu Rumah Tangga, wiraswasta, dan serabutan yaitu sebanyak 8 orang dengan persentase 20%. Dari hasil tersebut menyatakan bahwasanya masyarakat pada rumah sehat layak huni lebih banyak berkeja sebagai wiraswasta dan paling sedikit bekerja sebagai serabutan.

Diagram 4.2
Pekerjaan



4.1.8. Karakteristik Berdasarkan Usia

Karakteristik berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 43-50	14	35.0	35.0	35.0
Valid 51-57	18	45.0	45.0	80.0
Valid >58	8	20.0	20.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

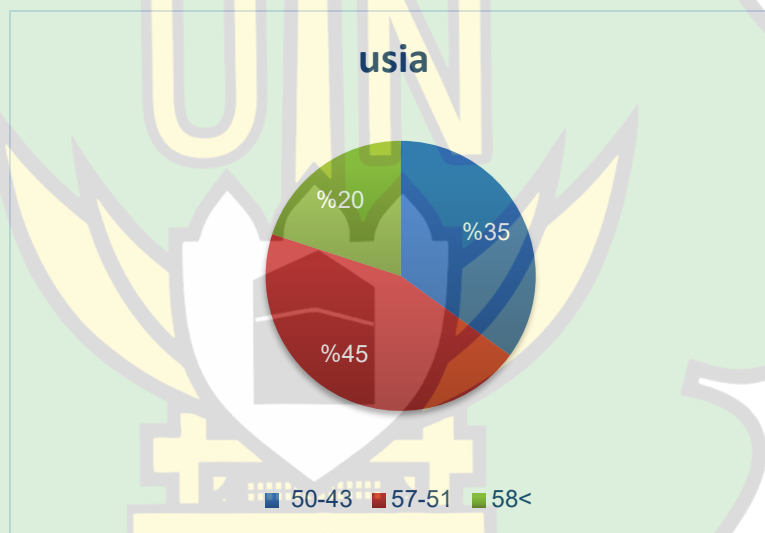
Sumber: Data Olahan (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya dengan jumlah responden 40 orang yang didapat peneliti di rumah sehat layak huni berdasarkan usia setiap penghuninya yaitu untuk usia 43-50 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 35%, selanjutnya untuk usia 51-57 tahun sebanyak 18 orang

dengan persentase 45% dan untuk usia di atas 58 tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 20%.

Dari hasil tersebut menyatakan bahwasanya masyarakat pada rumah sehat layak huni lebih dominan pada usia 51-57 tahun, dan selanjutnya diikuti dengan usia 43-50, dan untuk usia di atas 58 tahun sangatlah sedikit dibandingkan usia lainnya.

Diagram 4.3
Usia



4.1.9. karakteristik Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Karakteristik berdasarkan pendapatan per bulan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Pendapatan

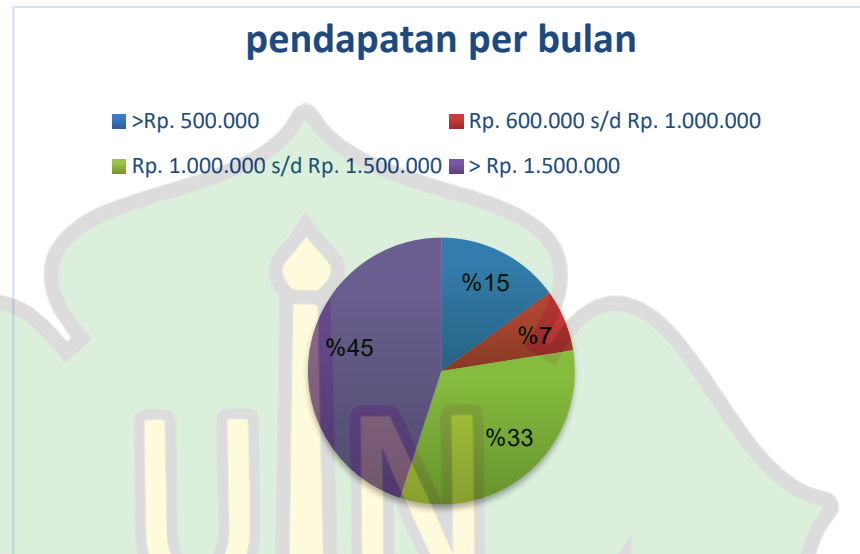
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<Rp.500.000	6	15.0	15.0	15.0
Rp.600.000-Rp.1.000.000	3	7.5	7.5	22.5
Valid Rp.1.000.000-Rp.1.500.000	13	32.5	32.5	55.0
>Rp.1.500.000	18	45.0	45.0	100.0
Total	40	100.0	100.0	

Sumber: Data Olahan (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwasanya dengan jumlah responden 40 orang yang didapat peneliti di rumah sehat layak huni berdasarkan jumlah pendapatan per bulan yang diperoleh oleh setiap penghuninya untuk masyarakat yang memperoleh pendapatan di bawah Rp.500.000 per bulan sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 15%, untuk masyarakat yang memperoleh pendapatan Rp.600.000 hingga Rp.1.000.000 per bulan sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 7,5%, untuk masyarakat yang memperoleh pendapatan Rp.1.000.000 hingga Rp.1.500.000 per bulan yaitu sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 32,5%, dan untuk masyarakat yang memperoleh pendapatan di atas Rp.1.500.000 per bulan yaitu sebanyak 18 orang dengan persentase sebesar 45%.

Dapat dilihat bahwasanya penghuni Rumah Sehat Layak Huni di Kota Banda Aceh ini lebih dominan memperoleh pendapatan diatas Rp. 1.500.000 per bulannya dan paling sedikit penghuni di Rumah Sehat Layak Huni di Kota Banda Aceh memperoleh pendapatan Rp.600.000 hingga Rp.1.000.000 per bulan.

Diagram 4.4
Pendapatan Per Bulan



4.1.10. Uji Coba Instrumen

Penelitian ini menggunakan data primer. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner, yaitu dengan memberikan pernyataan tertulis kepada responden. Selanjutnya responden memberikan tanggapan atas pernyataan yang diberikan. Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian.

Kuesioner yang diberikan dirancang dengan menggunakan skala likert. Keabsahan atau kesahihan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu test of validity (uji validitas atau kesahihan).

4.1.11. Uji Validitas

Pengujian validasi digunakan untuk mengukur tingkat valid atau sah nya pertanyaan suatu kuesioner. Kuesioner dianggap valid apabila pertanyaan tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur dari kuesioner. Uji validitas pada penelitian ini diolah menggunakan SPSS Version 26. Uji validitas pada penelitian digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner dengan skor total pada tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel sebanyak 40 responden.

Untuk pengujian validitasnya, maka peneliti membandingkan pearson correlation setiap butir soal dengan tabel r produk moment. Jika r hitung $>$ r tabel maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas dapat disajikan pada tabel dibawah ini dengan $n = 40$, maka didapatkan df sebesar $40 - 2 = 38$ dan $\alpha = 5\%$ maka nilai r tabel sebesar 0.3120.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Item	<i>r</i> hitung	<i>r</i> tabel	Kesimpulan
1	0.813	0.3120	Valid
2	0.794	0.3120	Valid
3	0.813	0.3120	Valid
4	0.794	0.3120	Valid
5	0.635	0.3120	Valid
6	0.766	0.3120	Valid
7	0.607	0.3120	Valid
8	0.688	0.3120	Valid
9	0.557	0.3120	Valid

10	0.581	0.3120	Valid
11	0.670	0.3120	Valid
12	0.701	0.3120	Valid
13	0.600	0.3120	Valid

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji validitas koefisiensi korelasi butir pertanyaan pada tabel diatas, didapatkan informasi bahwa semua item pertanyaan pada masing-masing variabel memiliki nilai rhitung > rtabel berdasarkan hal tersebut maka dapat diputuskan bahwa masing-masing item pertanyaan telah valid dan dapat lanjut ke uji reliabilitas.

4.1.12. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen penelitian yang digunakan, dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali atau paling tidak oleh responden yang sama. Perhitungan reliabilitas adalah perhitungan terhadap konsistensi data kuesioner dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Penggunaan rumus ini disesuaikan dengan teknik skoring yang dilakukan pada setiap item dalam instrumen. Nilai *correlated item-total correlation* dalam suatu indikator agar dinyatakan handal adalah minimal 0,70.

Untuk menguji reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan rumus Cronbach Alpha dan diolah menggunakan software SPSS versi 26. Adapun hasil dari pengujian reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Banyak Item	Keputusan
0.903	13	Reliabel

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel diatas, didapatkan informasi bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.903, nilai tersebut > 0.70 . Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut reliabel.

4.1.13. Hasil Analisis Data

Analisis Dan Pembahasan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni Di Kota Banda Aceh berdasarkan 13 pernyataan di atas yang sesuai dengan 3 indikator kepuasan masyarakat.

a) Perhitungan Nilai Skor Kepuasan Per Unsur yang dinilai:

Tabel 4.7
Nilai Skor Per Unsur Kepuasan

No.	Indikator Kepuasan	Nilai Per Unsur
1	Kualitas Pondasi Bangunan	149
2	Kualitas Lantai	152
3	Kualitas Atap	149
4	Bangunan sudah dilengkapi atap	152
5	Bangunan sudah dilengkapi lantai/keramik	141
6	Ventilasi udara	157
7	Pencahayaan	155
8	Saluran Pembuangan	154
9	Kamar Mandi, Jamban, Septic Tank	145

10	Ukuran Luas Rumah	155
11	Adanya Dapur & Air Bersih	156
12	Adanya Ruang Tidur	141
13	Kesesuaian Bangunan	156

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 26

b) Perhitungan Nilai Rata-Rata Per Unsur Kepuasan yang dinilai:

$$\text{Nilai Rata - Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{1}{X} = N$$

Tabel 4.8
Nilai Rata-Rata Per Unsur Kepuasan

No	Indikator Kepuasan	Jumlah Nilai Per Unsur	Nilai Rata-Rata Per Unsur
		Jumlah Responden	
1	Kualitas Pondasi Bangunan	149 : 40	3,73
2	Kualitas Lantai	152 : 40	3,8
3	Kualitas Atap	149 : 40	3,73
4	Bangunan sudah dilengkapi atap	152 :40	3,8
5	Bangunan sudah dilengkapi lantai/keramik	141 :40	3,5
6	Ventilasi udara	157 : 40	3,9
7	Pencahayaan	155 : 40	3,9
8	Saluran Pembuangan	154 : 40	3,9
9	Kamar Mandi,	145:40	3,6

	Jamban, Septic Tank		
10	Ukuran Luas Rumah	158 : 40	3,95
11	Adanya Dapur & Air Bersih	156 : 40	3,9
12	Adanya Ruang Tidur	141 : 40	3,53
13	Kesesuaian Bangunan	156:40	3,9

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 26

c) Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang kepuasan yang dinilai:

$$NRR \text{ Tertimbang} = NRR \text{ Per Unsur} \times 0,07$$

Tabel 4.9
Nilai Rata-Rata Tertimbang Kepuasan

No.	Indikator Pembangunan	NRR Per Unsur x 0,07	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Kualitas Pondasi Bangunan	149 x 0,07	0,26
2	Kualitas Lantai	152 x 0,07	0,27
3	Kualitas Atap	149 x 0,07	0,26
4	Bangunan sudah dilengkapi atap	152 x 0,07	0,3
5	Bangunan sudah dilengkapi lantai/keramik	141 x 0,07	0,2
6	Ventilasi udara	157 x 0,07	0,3
7	Pencahayaan	155 x 0,07	0,3
8	Saluran Pembuangan	154 x 0,07	0,3
9	Kamar Mandi, Jamban, Septic Tank	145 x 0,07	0,3

10	Ukuran luas rumah	158 x 0,07	0,28
11	Adanya Dapur & Air Bersih	156 x 0,07	0,27
12	Adanya Ruang Tidur	141 x 0,07	0,25
13	Kesesuaian Bangunan	171 x 0,07	0,27
<i>IKM</i>			3,43

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 26

d) Perhitungan Nilai Indeks

Menghitung Nilai Indeks yang sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR RI No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah Layak Huni (RLH). Untuk mempermudah interpretasi nilai IKM antara rentang 25-100, maka nilai rata-rata tertimbang dikonversikan dengan nilai dasar 25, yang mana rumusnya:

$$\text{Nilai Konversi IKM} = 3,43 \times 25 = 85,96$$

Selanjutnya Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni Di Kota Banda Aceh disesuaikan dengan kategori Kepuasan Masyarakat terhadap Penerima manfaat Rumah Layak Huni berdasarkan indeks yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.10

Rekapitulasi Hasil Analisis Kepuasan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Nilai Bobot	Kepuasan
3,73	93,1	A	Sangat Baik

3,8	95	A	Sangat Baik
3,73	93,1	A	Sangat Baik
3,8	95	A	Sangat Baik
3,5	88	A	Sangat Baik
3,9	98	A	Sangat Baik
3,9	97	A	Sangat Baik
3,9	96	A	Sangat Baik
3,6	91	A	Sangat Baik
3,95	98,8	A	Sangat Baik
3,9	97,5	A	Sangat Baik
3,53	88,1	A	Sangat Baik
3,9	97,5	A	Sangat Baik

Apabila dari masing-masing unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh berikut hasil penelitian indeks kepuasan masyarakat dari masing-masing unsur:

a.) Kualitas Pondasi Bangunan

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur kualitas pondasi bangunan = 149

$$\text{Nilai Rata - Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{149}{40} = 3,73$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur kualitas pondasi bangunan = $3,73 \times 25 = 93,1$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (kualitas pondasi bangunan) mendapatkan nilai 93,1 katagori “Sangat Baik”.

b.) Kualitas Lantai

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur kualitas lantai = 152

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{152}{40} = 3,8$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur kualitas lantai = $3,8 \times 25 = 95$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (kualitas lantai) mendapatkan nilai 95 katagori “Sangat Baik”.

c.) Kualitas Atap

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur kualitas atap = 149

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{149}{40} = 3,73$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur kualitas atap = $3,73 \times 25 = 93,1$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (kualitas atap) mendapatkan nilai 93,1 katagori “Sangat Baik”.

d.) Bangunan Sudah Dilengkapi Atap

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur bangunan sudah dilengkapi atap = 152

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{152}{40} = 3,8$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur bangunan sudah dilengkapi atap = $3,8 \times 25 = 95$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (Bangunan Sudah Dilengkapi Atap) mendapatkan nilai 76 katagori “Sangat Baik”.

e.) Bangunan Sudah Dilengkapi Lantai/keramik

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur bangunan sudah dilengkapi lantai/keramik = 141

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{141}{40} = 3,5$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur kualitas bangunan sudah dilengkapi lantai/keramik = $3,5 \times 25 = 88$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (bangunan sudah dilengkapi lantai/keramik) mendapatkan nilai 88 katagori “Sangat Baik”.

f.) Ventilasi Udara

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur Ventilasi Udara = 157

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{157}{40} = 3,9$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur ventilasi udara = $3,9 \times 25 = 98$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (ventilasi udara) mendapatkan nilai 98 katagori “Sangat Baik”.

g.) Pencahayaan

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur Pencahayaan = 155

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{155}{40} = 3,9$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur pencahayaan = $3,9 \times 25 = 97$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (pencahayaan) mendapatkan nilai 97katagori “Sangat Baik”.

h.) Saluran Pembuangan

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur saluran pembuangan = 154

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{154}{40} = 3,9$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur saluran pembuangan = $3,9 \times 25 = 96$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (saluran pembuangan) mendapatkan nilai 96 katagori “Sangat Baik”.

i.) Kamar Mandi, Jamban, Septic Tank

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai Kamar Mandi, Jamban, Septic Tank = 145

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{145}{40} = 3,62$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur Kamar Mandi, Jamban, Septic Tank = $3,62 \times 25 = 91$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (Kamar Mandi, Jamban, Septic Tank) mendapatkan nilai 91 katagori “Sangat Baik”.

j.) Ukuran Luas Rumah

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur ukuran luas rumah = 158

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{158}{40} = 3,95$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur ukuran luas rumah = $3,95 \times 25 = 98,8$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (ukuran luas rumah) mendapatkan nilai 74 kategori “Sangat Baik”.

k.) Adanya Dapur dan Air Bersih

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur adanya dapur dan air bersih = 156

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{156}{40} = 3,9$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur adanya dapur dan air bersih = $3,9 \times 25 = 97,5$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (adanya dapur dan air bersih) mendapatkan nilai 97,5 katagori “Sangat Baik”.

l.) Adanya Ruang Tidur

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur adanya ruang tidur = 141

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{141}{40} = 3,53$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur adanya ruang tidur = $3,53 \times 25 = 88,1$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (adanya ruang tidur) mendapatkan nilai 88,1 katagori “Sangat Baik”.

m.) Kesesuaian Bangunan

Hasil perhitungan kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

jumlah nilai unsur kesesuaian bangunan = 156

$$\text{Nilai Rata – Rata Per Unsur} = \frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}} = \frac{156}{40} = 3,9$$

Nilai IKM program rumah layak huni Kota Banda Aceh pada unsur kesesuaian bangunan = $3,9 \times 25 = 97,5$

Berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan PERMENPAN RB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, maka pada unsur kepuasan (kesesuaian bangunan) mendapatkan nilai 97,5 katagori “Sangat Baik”.

4.2. Pembahasan Hasil Analisis IKM

Hasil perhitungan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan terhadap penerima manfaat Program Rumah Sehat Layak Huni di Kota Banda Aceh yang diterima oleh masyarakat dengan menggunakan analisis indeks kepuasan masyarakat setelah dilakukan analisis maka dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Manfaat Terhadap Program Rumah Layak Huni di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Tabel 4.11
A R - Tabulasi Hasil IKM

Pertanyaan	Jumlah Nilai/Unsur	NRR/Unsur	Bobot Nilai Tertimbang	NRR Tertimbang/Unsur
Kualitas Pondasi Bangunan	149	3,73	0,07	0,26
Kualitas lantai	152	3,8	0,07	0,27

Kualitas atap	149	3,73	0,07	0,26
Bangunan Sudah Dilengkapi Atap	152	3,8	0,07	0,3
Bangunan sudah Dilengkapi Keramik	141	3,5	0,07	0,2
Ventilasi udara	157	3,9	0,07	0,3
Pencahayaan	155	3,9	0,07	0,3
Saluran Pembuangan	154	3,9	0,07	0,3
Kamar Mandi, Jamban, Septick Tank	145	3,6	0,07	0,3
Ukuran Luas Rumah	155	3,95	0,07	0,28
Adanya Dapur & Air Bersih	156	3,9	0,07	0,27
Adanya Ruang Tidur	141	3,53	0,07	0,25
Kesesuaian Bangunan	156	3,9	0,07	0,27
IKM				3,43
Konversi IKM				85,96

AR - RANIRY
Tabel 4.12

Kesimpulan Hasil IKM

Nilai IKM Tertimbang	IKM	Nilai Bobot	Kepuasan
3,43	85,96	A	Sangat Baik

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penerima Manfaat Program Rumah Sehat Layak Huni, maka hasil dari 13 pernyataan berdasarkan indikator Rumah Sehat Layak Huni mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,96 dan nilai bobot A dengan katagori “Sangat Baik”.

Adapun yang mendapat nilai tertinggi dari 13 item pernyataan adalah ukuran luas rumah dengan nilai konversi IKM 98,8 dan nilai bobot A dengan Katagori “Sangat Baik”. Sedangkan nilai terendah terdapat pada item pernyataan bangunan sudah dilengkapi lantai/keramik dengan nilai konversi IKM 88 dan nilai bobot A katagori “Sangat Baik”.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disarankan untuk mempertahankan program Rumah Layak Huni tersebut karena sangat dibutuhkan di tengah masyarakat yang kesulitan ekonomi dan memiliki tempat tinggal yang tidak layak ditempati.

2. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berdasarkan hasil peneliti pada saat pembagian kuesioner terdapat beberapa penerima pembangunan rumah layak huni yang rumahnya tidak dipasangkan keramik. Maka peneliti berharap agar dinas terkait untuk berlaku adil pada saat proses pembangunan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abu Ahmadi, 2003. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: RenikaCipta

Ahmad Tanzeh, 2011. Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras.

Asrof Syafi'i, 2005. Metode Penelitian Pendidikan. Surabaya: eLKAF.

Iqbal Hasan, 2006. Analisis Data Penelitian dengan Statistik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Waluyo, 2007. Manajemen Publik Konsep Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

UNDANG-UNDANG:

Peraturan Menteri PUPR RI. 2018. No. 29/PRT/M/2018 Tentang *Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*.

Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 *Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat*.

Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2016 *Tentang Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh.*

Artikel/Website:

bps.go.id, diakses pada 12 Maret 2023

[Bpsaceh.go.id](https://bpsaceh.go.id), diakses pada 28 Juli 2023

<https://perkim.id/profil-pkp/> diakses pada 14 Februari 2023

<https://perkim.bandaacehkota.go.id>. Diakses pada 10 Juni 2023.

<https://aceh.tribunnews.com>. Diakses pada 9 Desember 2022.

Skripsi:

Ajinu Stefano Da Costa, Implementasi Program Rumah Layak Huni Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Asdaf Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Fazli Efendi, “Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti” Skripsi Universitas Islam Riau, 2019.

Rahmawati Zania, “Efektivitas Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Bansos-RTLH) Di Kota Tegal” Skripsi Universitas Diponegoro, 2017.

DOKUMENTASI

Rumah Layak Huni yang tidak dipasangkan lantai keramik



Rumah Layak Huni yang dipasangkan lantai keramik

